AKUA: Jurnal Akuntasi dan Keuangan
https://journal.yp3a.org/index.php/AKUA
e-ISSN 2809-851X | p-ISSN 2810-0735
Vol. 5 No. 4 (Oktober 2026) 1136-1143
DOI: 10.54259/akua.v5i4.9295

Praktik Pencatatan Keuangan UMKM Kuliner Berbasis SAK EMKM di PIK 2 Tangerang

Azza Billa Amanda[1], Peter Rajagukguk[2*]
[1,2]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, Indonesia
Email: [1]azzaamanda57@gmail.com, [2*]risetpeter@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the low quality of financial recording among culinary MSMEs and the gap between SAK EMKM standards and field practices, particularly in the PIK 2 area which has never been studied before. This study aims to analyze financial recording practices, measure the gap between normative requirements and actual realities, and identify the contributing factors and obstacles faced by culinary MSMEs in the PIK 2 area, Tangerang Regency. The method used is Concurrent Embedded Design (CED), combining quantitative questionnaires from 41 respondents and qualitative interviews with 7 informants. The results show that recording practices are hybrid: income is automatically recorded via QRIS, but cash expenditures are recorded manually and incompletely due to negligence Although 83% of respondents rate their finance separation as good, 5 of 7 informants have not separated personal and business finances. 78% of respondents prepare simplified income statements and 88% prepare simplified balance sheets, but both are not in accordance with SAK EMKM standards, while understanding of CALK is only 29%. The main contributing factors are lack of understanding of SAK EMKM, absence of training from area management, and lack of external pressure. This study recommends QRIS-integrated digital recording applications and continuous mentoring.

Keywords: *SAK EMKM, Financial Recording, Culinary MSMEs, CED.*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kualitas pencatatan keuangan UMKM kuliner serta kesenjangan antara standar SAK EMKM dengan praktik di lapangan, khususnya di kawasan PIK 2 yang belum pernah diteliti sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik pencatatan keuangan, mengukur kesenjangan antara kebutuhan normatif dan realitas aktual, serta mengidentifikasi faktor penyebab dan kendala yang dihadapi UMKM kuliner di kawasan PIK 2, Kabupaten Tangerang. Metode yang digunakan adalah *Concurrent Embedded Design* (CED), menggabungkan kuesioner kuantitatif kepada 41 responden dan wawancara mendalam kualitatif kepada 7 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pencatatan bersifat hybrid: pendapatan tercatat otomatis melalui QRIS, namun pengeluaran tunai dicatat manual dan tidak lengkap karena kelalaian . Meskipun 83% responden menilai pemisahan keuangan sudah baik, 5 dari 7 informan belum memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Sebanyak 78% responden menyusun laporan laba rugi versi sederhana dan 88% menyusun neraca versi sederhana, namun keduanya belum sesuai standar SAK EMKM, sementara pemahaman CALK hanya 29%. Faktor penyebab utama adalah ketidakpahaman SAK EMKM, tidak adanya pelatihan dari pengelola kawasan, dan tidak adanya tekanan eksternal. Penelitian ini merekomendasikan aplikasi pencatatan digital terintegrasi QRIS dan pendampingan berkelanjutan.

Kata Kunci: SAK EMKM, Pencatatan Keuangan, UMKM Kuliner, CED

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari 60%

Submitted: 09-09-2026 | Accepted: 09-10-2026 | Published: 15-10-2026

serta menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional [1]. Namun, kelemahan mendasar yang menghambat perkembangan UMKM adalah rendahnya kualitas pencatatan keuangan. Pemerintah melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada tahun 2018 yang hanya mewajibkan tiga komponen laporan keuangan: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan atas Laporan Keuangan [2].

Berbagai penelitian menunjukkan implementasi SAK EMKM pada UMKM masih kurang menggembirakan. Taftorona et al. [3] menemukan laporan keuangan UMKM kuliner di Kota Madiun belum sepenuhnya mengacu SAK EMKM, terutama dalam pencatatan aset tetap tanpa penyusutan. Hasmi dan Jufri [4] juga menemukan kesenjangan antara praktik sederhana UMKM dengan standar SAK EMKM. Menurut Harahap [5], pencatatan keuangan merupakan fondasi dari seluruh siklus akuntansi dan menjadi langkah awal dalam penyusunan laporan keuangan. Sugiri dan Riyono [6] menambahkan bahwa pencatatan keuangan yang baik setidaknya mencakup bukti transaksi, jurnal, buku besar, dan neraca saldo.

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan pertumbuhan UMKM pesat di Provinsi Banten. Salah satu kecamatan dengan potensi UMKM kuliner terbesar adalah Kecamatan Kosambi, yang merupakan lokasi utama kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2). Catio et al. [7] menemukan bahwa literasi keuangan UMKM di Kabupaten Tangerang masih rendah dan membutuhkan pelatihan pencatatan digital. Riandi et al. [8] juga membuktikan bahwa strategi pengelolaan keuangan yang efektif dapat meningkatkan produktivitas UMKM di wilayah ini.

Penelitian ini penting dilakukan karena masih terdapat inkonsistensi temuan di antara peneliti terdahulu. Ghina et al. [9] dan Pratiwi et al. [10] menemukan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAK EMKM, namun Taftorona et al. [3] menemukan bahwa meskipun pemahaman rendah, beberapa UMKM tetap dapat mencatat secara sederhana. Sari dan Fitriawati [11] juga menemukan bahwa tingkat pendidikan dan pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan UMKM. Fokus utama penelitian ini adalah kesenjangan antara kebutuhan normatif (standar SAK EMKM) dengan realitas aktual (praktik di lapangan) pada lima aspek, yaitu pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pemisahan keuangan pribadi dan usaha, penyusunan Laporan Laba Rugi, penyusunan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), serta penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Inkonsistensi temuan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan tunggal belum cukup untuk menjelaskan kesenjangan antara standar dan praktik. Penelitian kuantitatif seperti [9]–[11] menguji pengaruh pemahaman akuntansi terhadap penerapan standar, tetapi tidak menjelaskan mengapa pelaku usaha yang menilai pencatatannya baik tetap belum memenuhi format standar. Sebaliknya, pendekatan kualitatif semata tidak dapat mengukur seberapa luas kesenjangan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Concurrent Embedded Design (CED), yaitu desain campuran yang mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan dengan salah satu metode sebagai pusat [12]. Dalam desain ini, wawancara mendalam sebagai metode utama menggali alasan di balik praktik pencatatan, sedangkan kuesioner sebagai metode pendukung mengukur tingkat kesenjangan pada setiap aspek, sehingga temuan wawancara dapat langsung menjelaskan angka hasil kuesioner.

Kebaruan penelitian ini terletak pada empat hal. Pertama, lokasi PIK 2 yang belum pernah diteliti. Kedua, fokus pada lima aspek kesenjangan. Ketiga, klarifikasi inkonsistensi peneliti terdahulu. Keempat, penggunaan metode Concurrent Embedded Design (CED) yang menggabungkan survei kuantitatif dan wawancara kualitatif, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mayoritas menggunakan metode tunggal. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis praktik pencatatan keuangan UMKM kuliner di kawasan PIK 2, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, mengukur kesenjangan antara kebutuhan normatif SAK EMKM dan realitas aktual, serta mengidentifikasi faktor penyebab dan kendala yang dihadapi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*) dengan desain *Concurrent Embedded Design* (CED). Menurut Creswell dan Plano Clark [12], CED adalah desain penelitian campuran yang menggabungkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan (*concurrent*), dengan salah satu metode menjadi yang utama (*embedded*). Pada penelitian ini, metode kualitatif ditetapkan sebagai metode utama (QUAL) untuk menggali praktik pencatatan keuangan UMKM secara mendalam melalui wawancara, sedangkan metode kuantitatif sebagai

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

metode pendukung (quan) untuk mengukur tingkat kesenjangan antara kebutuhan dan realitas melalui kuesioner.

Objek penelitian ini adalah praktik pencatatan keuangan berbasis SAK EMKM pada UMKM kuliner. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pemilik atau pengelola UMKM kuliner yang beroperasi di kawasan PIK 2, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Kriteria pemilihan sampel adalah pemilik atau pengelola UMKM kuliner, usaha telah beroperasi minimal 1 tahun, berlokasi di kawasan PIK 2, Kecamatan Kosambi, bersedia diwawancarai secara mendalam dan direkam, serta mewakili variasi skala usaha (mikro dan kecil) dan jenis kuliner. Target awal penelitian adalah 30-40 responden kuesioner dan 5-10 informan wawancara; pada pelaksanaannya diperoleh 41 responden, dan 7 informan dipilih dari responden berdasarkan kesediaan diwawancarai serta keragaman jenis dan skala usaha. Wawancara dihentikan pada 7 informan karena data telah jenuh (data saturation). Penelitian dilaksanakan pada Maret sampai Juni 2026.

Data kuantitatif dari kuesioner dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan skala Likert 1-5. Data kualitatif dari wawancara mendalam dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Integrasi data dilakukan dengan membandingkan hasil kuantitatif dan kualitatif untuk menjelaskan mengapa kesenjangan terjadi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) terletak di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan kuliner modern yang berkembang pesat di wilayah Jabodetabek. Sejak diresmikannya Aloha PIK 2 pada tahun 2023, kawasan ini menjadi destinasi wisata kuliner yang ramai dikunjungi. Mayoritas UMKM kuliner yang beroperasi di kawasan PIK 2 memiliki skala usaha mikro hingga kecil. Struktur organisasi yang ada bersifat sangat sederhana dan datar, di mana seluruh kegiatan operasional termasuk pencatatan keuangan umumnya dikelola secara langsung oleh pemilik usaha dengan dibantu 1-3 orang karyawan. Hal ini sejalan dengan karakteristik UMKM yang dikemukakan oleh Tambunan [1], yaitu manajemen yang relatif sederhana dan cenderung dikelola secara kekeluargaan serta minimnya penerapan sistem akuntansi formal dalam pencatatan keuangan. Karakteristik responden berdasarkan jenis usaha disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah	Persentase
Makanan Jadi	16	39%
Cemilan/Snack	15	37%
Minuman	9	22%
Oleh-oleh Makanan	1	2%
Katering	0	0%
TOTAL	41	100%

Sumber: Hasil Kuesioner, 2026

Berdasarkan Tabel 1, usaha makanan jadi (39%) dan cemilan/snack (37%) mendominasi responden, diikuti usaha minuman (22%) dan oleh-oleh makanan (2%), sedangkan tidak ada responden yang bergerak di bidang katering.

3.2 Praktik Pencatatan Pemasukan dan Pengeluaran

Berdasarkan hasil kuesioner dari 41 responden, ditemukan bahwa sebagian besar UMKM kuliner di PIK 2 telah menerapkan pencatatan pemasukan dan pengeluaran, namun dengan metode yang masih sederhana. Sebanyak 90% responden berada pada kategori "Sangat Baik" dan "Baik", yang berarti mereka menilai pencatatan pemasukan dan pengeluaran telah dilakukan dengan baik (Tabel 2).

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tabel 2. Distribusi Jawaban Pencatatan Pemasukan dan Pengeluaran

Skor	Keterangan	Jumlah	Persentase
5	Sangat Baik / Sangat Tahu	10	24%
4	Baik / Tahu	27	66%
3	Cukup / Cukup Tahu	4	10%
2	Kurang / Kurang Tahu	0	0%
1	Sangat Kurang / Tidak Tahu	0	0%
	TOTAL	41	100%

Sumber: Hasil Kuesioner, 2026

Hasil wawancara mendalam mengungkapkan bahwa pencatatan yang dilakukan bersifat hybrid (gabungan digital dan manual). Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan: "Pemasukan sudah otomatis rapi berkat QRIS... Jadi saya tinggal fokus mencatat biaya operasional saja di buku harian." (I1, Pemilik Alpukat Kocok & Durian). Namun, temuan wawancara juga menunjukkan bahwa pencatatan pengeluaran tunai (non-QRIS) seringkali tidak lengkap karena kelalaian atau kehilangan nota. Hal ini diakui oleh hampir seluruh informan: "Pembelian bahan baku di pasar itu kan tunai dan tidak memakai QRIS... nota pembelian tersebut sering terselip atau saya lupa menginputnya." (I1, I3, I4, I5, I6, I7). Contoh catatan manual yang dibuat informan disajikan pada Tabel 3. Temuan ini sejalan dengan Irfansyah [13] yang menemukan bahwa UMKM hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran sederhana, belum memisahkan keuangan pribadi dan usaha.

Tabel 3. Contoh Catatan Manual Pemasukan dan Pengeluaran UMKM

Tanggal	Keterangan	Pemasukan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Metode/Catatan
1 Juni 2026	Penjualan Es Goyang	500.000	–	QRIS
1 Juni 2026	Beli gula, santan, es batu	–	150.000	Tunai (nota hilang)
2 Juni 2026	Penjualan Es Goyang	450.000	–	QRIS
2 Juni 2026	Beli cup plastik, sedotan	–	75.000	Tunai
3 Juni 2026	Penjualan Es Goyang	600.000	–	QRIS
3 Juni 2026	Beli durian (bahan baku)	–	200.000	Tunai (tidak dicatat)
Total		1.550.000	425.000	

Sumber: Ilustrasi berdasarkan keterangan I4 (Es Goyang Kampoeng), 2026

3.3 Pemisahan Keuangan Pribadi dan Usaha

Berdasarkan Tabel 4, sebanyak 83% responden berada pada kategori "Sangat Baik" dan "Baik", yang berarti mereka menilai telah memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Sementara itu, 17% responden berada pada kategori "Cukup".

Tabel 4. Distribusi Jawaban Pemisahan Keuangan Pribadi dan Usaha

Skor	Keterangan	Jumlah	Persentase
5	Sangat Baik / Sangat Tahu	21	51%
4	Baik / Tahu	13	32%
3	Cukup / Cukup Tahu	7	17%
2	Kurang / Kurang Tahu	0	0%
1	Sangat Kurang / Tidak Tahu	0	0%
	TOTAL	41	100%

Sumber: Hasil Kuesioner, 2026

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa pemisahan keuangan bersifat semi-terpisah. Uang dari transaksi QRIS otomatis masuk ke rekening usaha, tetapi uang tunai dari pembeli seringkali masih tercampur dengan kebutuhan pribadi: "Dana yang masuk lewat QRIS otomatis tersimpan di rekening penampung usaha. Tapi... uang tunai di laci lapak... kadang-kadang masih saya pakai langsung untuk keperluan logistik pribadi." (I1). Sebanyak 5 dari 7 informan mengaku belum memisahkan keuangan pribadi dan usaha, terutama karena skala usaha masih mikro, sehingga penilaian baik pada kuesioner belum sepenuhnya tecermin dalam praktik.Temuan ini mengkonfirmasi Ghina et al. [9] yang menyatakan bahwa sebagian besar UMKM masih

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

mencampur keuangan pribadi dan usaha, sehingga sulit mengetahui laba/rugi usaha secara akurat.

3.4 Penyusunan Laporan Laba Rugi

Sebanyak 78% responden berada pada kategori "Sangat Baik" dan "Baik", yang berarti mereka menilai telah menyusun Laporan Laba Rugi secara rutin setiap bulan (Tabel 5)

Tabel 5. Distribusi Jawaban Penyusunan Laporan Laba Rugi

Skor	Keterangan	Jumlah	Persentase
5	Sangat Baik / Sangat Tahu	19	46%
4	Baik / Tahu	13	32%
3	Cukup / Cukup Tahu	9	22%
2	Kurang / Kurang Tahu	0	0%
1	Sangat Kurang / Tidak Tahu	0	0%
	TOTAL	41	100%

Sumber: Hasil Kuesioner, 2026

Namun, hasil wawancara mendalam mengungkapkan bahwa laporan laba rugi yang dimaksud oleh responden adalah versi sederhana buatan sendiri, bukan laporan formal sesuai standar SAK EMKM: "Maksud skor 4 itu saya rajin bikin hitung-hitungan laba rugi versi sederhana saya sendiri di buku... Tapi kalau ditanya laporan resmi akuntansi kayak Neraca... itu karena saya beneran tidak paham SAK." (I2). Contoh laporan laba rugi versi sederhana tersebut disajikan pada Tabel 6. Tingkat keyakinan informan terhadap angka laba bersih yang mereka hitung berada di kisaran 70-80%, karena ketidakpastian pada pencatatan pengeluaran tunai. Temuan ini sejalan dengan Hasmi dan Jufri [4] yang menemukan bahwa UMKM tidak menyusun Laporan Laba Rugi secara formal; mereka hanya mengetahui "kira-kira" untung atau rugi.

Tabel 6. Laporan Laba Rugi Versi Sederhana Informan I2 (Periode Mei 2026)

Komponen	Jumlah (Rp)
Pemasukan	
Hasil jualan harian (QRIS + tunai)	8.500.000
Pengeluaran	
Beli tebu (bahan baku)	2.500.000
Beli es batu	450.000
Beli cup dan sedotan	300.000
Sewa tempat (per bulan)	1.000.000
Listrik dan air	200.000
Lain-lain	150.000
Total pengeluaran	4.600.000
Laba bersih (pemasukan - pengeluaran)	3.900.000

Sumber: Ilustrasi berdasarkan keterangan I2, 2026 (usaha Tebu Murni; dihitung pemilik pada 31 Mei 2026)

3.5 Penyusunan Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Sebanyak 88% responden berada pada kategori "Sangat Baik" dan "Baik", yang berarti mereka menilai telah menyusun Laporan Posisi Keuangan (Neraca) yang mencatat aset, utang, dan modal (Tabel 7).

Tabel 7. Distribusi Jawaban Penyusunan Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Skor	Keterangan	Jumlah	Persentase
5	Sangat Baik / Sangat Tahu	13	32%
4	Baik / Tahu	23	56%
3	Cukup / Cukup Tahu	5	12%
2	Kurang / Kurang Tahu	0	0%
1	Sangat Kurang / Tidak Tahu	0	0%
	TOTAL	41	100%

Sumber: Hasil Kuesioner, 2026

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Namun, hasil wawancara mengkonfirmasi bahwa pemahaman responden tentang "neraca" masih bersifat sederhana. Mereka mencatat aset dan utang secara garis besar, belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku: "Kami cuma pakai format sederhana versi kami sendiri, bukan yang standar baku akuntansi." (I4). Temuan ini mengkonfirmasi Taftorona et al. [3] yang menyatakan bahwa UMKM tidak pernah menyusun neraca karena dianggap rumit dan tidak diperlukan.

3.6 Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Hanya 29% responden yang berada pada kategori "Baik", yang berarti mereka menilai telah membuat Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Sebanyak 54% responden berada pada kategori "Cukup", dan 17% responden berada pada kategori "Kurang" (Tabel 8).

Tabel 8. Distribusi Jawaban Penyusunan CALK

Skor	Keterangan	Jumlah	Persentase
5	Sangat Baik / Sangat Tahu	0	0%
4	Baik / Tahu	12	29%
3	Cukup / Cukup Tahu	22	54%
2	Kurang / Kurang Tahu	7	17%
1	Sangat Kurang / Tidak Tahu	0	0%
	TOTAL	41	100%

Sumber: Hasil Kuesioner, 2026

Temuan wawancara mengkonfirmasi bahwa sebagian besar informan baru mengetahui istilah SAK EMKM saat mengisi kuesioner, dan tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pengelola kawasan: "Saya baru tahu secara eksplisit ya saat membaca lembar kuesioner ini. Selama lebih dari 5 tahun saya mengelola usaha ini, istilah SAK EMKM belum pernah disosialisasikan." (I1). Temuan ini mengkonfirmasi Taftorona et al. [3] yang menyatakan bahwa UMKM tidak pernah membuat CALK karena tidak memahami fungsinya.

3.7 Faktor Penyebab Kesenjangan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan 7 informan, ditemukan beberapa faktor penyebab terjadinya kesenjangan (Tabel 9).

Tabel 9. Faktor Penyebab Kesenjangan

Faktor Penyebab	Jumlah Informan	Persentase	Kutipan Contoh
Tidak paham SAK EMKM	7	100%	"Saya tidak paham format akuntansi SAK yang baku" (I1, I3, I5)
Kelalaian mencatat pengeluaran tunai	7	100%	"Nota belanjanya hilang dan saya lupa mencatat pengeluaran itu" (I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7)
Tidak ada pelatihan dari pengelola	7	100%	"Tidak pernah ada pelatihan dari pengelola PIK" (I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7)
Tidak ada tekanan eksternal	7	100%	"Manager UMKM PIK tidak pernah menuntut laporan keuangan" (I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7)
Keterbatasan waktu & tenaga	4	57%	"Capek fisik, pas malam pulang badan pegal" (I1, I2, I4, I7)
SAK EMKM dianggap belum perlu (skala mikro)	4	57%	"Untuk omzet Rp 1-5 juta, SAK EMKM dirasa terlalu rumit" (I1, I2, I4, I5)

Sumber: Hasil Wawancara, 2026

Temuan ini sejalan dengan Khairunnisa et al. [14] yang menemukan bahwa kendala utama implementasi SAK EMKM adalah kurangnya pemahaman akuntansi dan keterbatasan SDM. Pratiwi et al. [10] juga menemukan bahwa ukuran usaha dan pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAK EMKM.

3.8 Analisis Fenomena dan Temuan Baru

Fenomena Pencatatan Hybrid (Digital-Manual). Salah satu fenomena menarik yang ditemukan adalah pola pencatatan hybrid yang diterapkan oleh seluruh informan. Fenomena ini muncul sebagai bentuk adaptasi praktis UMKM terhadap tuntutan digitalisasi di kawasan PIK 2. Informan tidak anti terhadap pencatatan digital, tetapi mereka memilih jalan tengah yang paling efisien.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Temuan ini sejalan dengan Nurjanah dan Wibisono [15] yang menemukan bahwa literasi keuangan dan penggunaan QRIS berkontribusi pada keputusan pelaku UMKM dalam pelaporan SAK EMKM.

Fenomena Ketidaklengkapan Pencatatan Pengeluaran Tunai. Fenomena paling dominan yang ditemukan adalah ketidaklengkapan pencatatan pengeluaran tunai (non-QRIS). Seluruh informan (7 dari 7) mengakui bahwa pengeluaran yang dilakukan secara tunai di pasar tradisional seringkali tidak tercatat karena kelalaian atau kehilangan nota. Tingkat keyakinan informan terhadap angka laba bersih yang mereka hitung hanya berkisar 70-80%.

Fenomena Ketidaktahuan SAK EMKM dan Tidak Adanya Pelatihan. Fenomena yang paling mengkhawatirkan adalah rendahnya pengetahuan tentang SAK EMKM di kalangan informan. Sebagian besar informan (6 dari 7) baru mengetahui istilah SAK EMKM saat mengisi kuesioner penelitian ini. Seluruh informan (7 dari 7) mengakui bahwa tidak pernah ada pelatihan atau sosialisasi dari pihak pengelola kawasan PIK 2 terkait pencatatan keuangan atau SAK EMKM. Temuan ini mengkonfirmasi Chrissanty [16] yang menyatakan bahwa penerapan SAK EMKM pada UMKM masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pemahaman standar akuntansi.

Selain ketiga fenomena tersebut, penelitian ini menemukan empat temuan baru yang belum banyak dibahas dalam literatur akuntansi UMKM. Pertama, fenomena "Hybrid Accounting", yaitu UMKM menerapkan sistem pencatatan hybrid dengan QRIS untuk pendapatan dan buku manual untuk pengeluaran. Kedua, "Kesenjangan Digital" antara pendapatan dan pengeluaran, di mana sisi pendapatan sudah terdigitalisasi melalui QRIS, tetapi sisi pengeluaran masih manual. Ketiga, tidak adanya pelatihan dari pengelola kawasan, di mana 100% informan belum pernah mendapatkan pelatihan atau sosialisasi tentang pencatatan keuangan. Keempat, proses wawancara sebagai katalis kesadaran, di mana selama wawancara informan mengalami kesadaran reflektif tentang kelemahan sistem pencatatan mereka. Temuan ini memperluas teori kesenjangan (gap theory) yang dikemukakan Hasmi dan Jufri [4] serta teori kepatuhan (Slippery Slope Framework) yang dikembangkan Tahar dan Bandi [17].

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, serta analisis fenomena mengenai kesenjangan pencatatan keuangan UMKM kuliner di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), berikut adalah kesimpulan dari penelitian ini.

Praktik pencatatan keuangan UMKM kuliner di PIK 2 bersifat hybrid (gabungan digital dan manual). Pendapatan tercatat otomatis melalui QRIS (100% informan) dengan akurat, namun pengeluaran tunai dicatat manual di buku tulis atau notes HP dan seringkali tidak lengkap karena nota hilang atau lupa dicatat. Pemisahan keuangan pribadi dan usaha bersifat semi-terpisah: uang dari QRIS otomatis masuk rekening usaha, tetapi uang tunai dari pembeli masih sering tercampur dengan uang pribadi. Laporan Laba Rugi dan Neraca dibuat dalam versi sederhana oleh 78-88% responden, tetapi belum sesuai standar SAK EMKM, sementara CALK hanya dipahami oleh 29% responden.

Terdapat kesenjangan yang signifikan pada semua aspek. Kesenjangan tertinggi terjadi pada aspek CALK (hanya 29% setuju) dan pemisahan keuangan (5 dari 7 informan belum memisahkan keuangan pribadi dan usaha). Pada aspek Laporan Laba Rugi dan Neraca, meskipun 78-88% responden mengaku menyusun, formatnya masih versi sederhana dan belum sesuai standar SAK EMKM. Tingkat keyakinan informan terhadap akurasi laba bersih hanya 70-80%, yang mengindikasikan bahwa ketidaklengkapan pencatatan pengeluaran tunai berdampak signifikan terhadap validitas laporan keuangan informal mereka.

Faktor penyebab kesenjangan bersifat multidimensional. Faktor internal meliputi: ketidakpahaman terhadap SAK EMKM (100% informan), kelalaian mencatat pengeluaran tunai (100% informan), keterbatasan waktu dan tenaga (57% informan), serta persepsi bahwa SAK EMKM terlalu rumit untuk skala usaha mikro (57% informan). Faktor eksternal meliputi: tidak adanya pelatihan atau sosialisasi dari pengelola kawasan PIK 2 (100% informan) serta tidak adanya tekanan atau kewajiban untuk menyusun laporan keuangan (100% informan).

Kendala yang dihadapi adalah ketidakpahaman SAK EMKM, kelalaian mencatat pengeluaran tunai (nota hilang/lupa), tidak ada pelatihan dari pengelola, tidak ada tekanan eksternal, serta keterbatasan waktu dan tenaga. Solusi yang diharapkan: aplikasi pencatatan keuangan digital

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

yang terintegrasi dengan QRIS (otomatis catat pendapatan + input pengeluaran), pelatihan gratis dengan bahasa yang mudah dicerna, serta pendampingan berkelanjutan dari pengelola kawasan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini, khususnya kepada Bapak Drs. Peter Rajagukguk, MM selaku dosen pembimbing, pihak pengelola kawasan PIK 2, serta seluruh pelaku UMKM kuliner di kawasan PIK 2 yang telah bersedia menjadi responden dan informan dalam penelitian ini.

REFERENCES

[1] T. Tambunan, *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: LP3ES, 2020.

[2] Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)*. Jakarta, Indonesia: Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, 2018.

[3] H. D. Taftorona, D. T. Agustin, A. Yuliana, and S. L. Putri, "Penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah (SAK EMKM) terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Madiun," *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, vol. 2, no. 1, pp. 196–202, 2025, doi: [lengkapi DOI].

[4] N. Hasmi and N. A. Jufri, "Penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah (SAK EMKM) (studi kasus di UD. Galaxy Sport)," *Jurnal Akuntansi Kompetif*, vol. 6, no. 1, pp. 41–52, 2023, doi: 10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1244.

[5] S. S. Harahap, *Manajemen Keuangan*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers, 2019.

[6] S. Sugiri and B. A. Riyono, *Pengantar Akuntansi 1*, 10th ed. Yogyakarta, Indonesia: YKPN, 2018.

[7] M. Catio, S. Sampurnaningsih, R. Hidayat, N. Faddilah, Hasbiyansyah, M. Fakhrurazi, and Y. C. Nandani, "Peningkatan literasi keuangan bagi pelaku UMKM melalui pelatihan pencatatan keuangan digital di Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang," *Jabdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 3, no. 1, pp. 37–39, 2025, doi: 10.56457/jabdimas.v3i1.218.

[8] A. Riandi, R. Rachmawaty, M. Havizh, Suradi, S. Febrianto, F. Islami, and M. Marjohan, "Strategi pengelolaan keuangan dalam meningkatkan produktivitas UMKM di Sindang Jaya Kabupaten Tangerang," *Jabdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 3, no. 1, pp. 25–30, 2025, doi: 10.56457/jabdimas.v3i1.216.

[9] A. Ghina, R. A. Pebriani, and N. Y. Maleha, "Pengaruh pemahaman akuntansi dan kesiapan pembukuan terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM dengan penerapan SAK EMKM sektor kuliner Kota Palembang," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, vol. 9, no. 3, pp. 523–537, 2025, doi: 10.31955/mea.v9i3.6217.

[10] A. Pratiwi, N. Widayati, and F. Fauzi, "Analisis determinasi faktor penyusunan laporan keuangan UMKM berbasis SAK EMKM," *E-Jurnal Akuntansi TSM*, vol. 5, no. 3, pp. [halaman], 2025, doi: [lengkapi DOI].

[11] A. P. Sari and R. Fitriawati, "Pengaruh tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi dan penerapan akuntansi terhadap laporan keuangan UMKM (studi kasus UMKM Tangerang Selatan)," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 2, no. 9, pp. 145–151, 2024, doi: [lengkapi DOI].

[12] J. W. Creswell and V. L. Plano Clark, *Designing and Conducting Mixed Methods Research*, 3rd ed. Thousand Oaks, CA, USA: SAGE Publications, 2018.

[13] F. Irfansyah, "Kendala penerapan SAK EMKM pada penyusunan laporan keuangan UMKM (studi pada pelaku UMKM Forum Musyawarah Ekonomi Kerakyatan Provinsi Kalimantan Barat)," Skripsi, Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia, 2023.

[14] A. Khairunnisa, D. Nafrilla, F. Hani, R. A. Pratama, I. DwiAnti, A. A. prasetyo, and E. Septiana, "Implementasi SAK UMKM dalam pelaporan keuangan sederhana UMKM kuliner atau UMKM produsen cemilan," *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, vol. 3, no. 4, pp. 431–438, 2025, doi: 10.61722/japm.v3i4.6079.

[15] Y. S. Nurjanah and T. Wibisono, "Penerapan SAK EMKM berbasis penggunaan QRIS dan literasi keuangan (studi persepsi pelaku UMKM kuliner Tasikmalaya)," *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, vol. 7, no. 2, pp. 438–453, 2023, doi: 10.33059/jensi.v7i2.9007.

[16] I. C. Chrissanty, "Analisis penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah pada UMKM may's kitchen," *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 9, no. 2, pp. 1–5, 2024, doi: 10.70375/e-logis.v6i1.61. *Catatan: DOI yang tertera pada file tampak tidak sesuai dengan nama jurnal.*

[17] A. Tahar and Bandi, "Determinants of enforced and voluntary tax compliance: adopting slippery slope framework," *Journal of Accounting and Investment*, vol. 25, no. 2, pp. 621–636, 2024, doi: 10.18196/jai.v25i2.20886.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)